

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Seperti kita ketahui Iran adalah negara yang memiliki latar belakang sejarah yang perlu dipelajari, sehingga sangat pantas bila kita beri perhatian khusus. Iran dalam dinamika politik domestiknya yang selalu diikuti oleh politiknya dikancah internasional, selalu menjadi bahan pengamatan dari analisis barat serta negara disekitarnya.

Sejak dahulu Iran adalah negeri yang memiliki peradaban tinggi dengan latar belakang sejarah sebagai bangsa yang dikenal sebagai pekerja keras. Saat sekarang dimana Iran dapat digolongkan sebagai negara berkembang, Iran juga memiliki cerita yang layak dianalisa lebih dalam. Pergolakan politik domestik yang ada di Iran menarik perhatian para pemerhati bidang kajian Timur-Tengah, seperti dengan kian maraknya isu-isu demokratisasi, reinterpretasi *Vilayat-Al-Faqih* sebagai pedoman Republik Islam Iran, serta polemik otoritas ulama (kaum *ayatullah* dan *mullah*) dengan kaum moderat di Iran, mendorong penulis untuk melakukan penelitian, khususnya politik domestik Iran yang terkait dengan isu-isu kontemporer saat ini.

Penulis mencermati bahwa wacana mengenai permasalahan politik domestik Iran telah banyak ditulis dalam bentuk kepustakaan sebelumnya. Bentuk penulisan-penulisan yang telah ada, menurut penulis perlu adanya tambahan data-data yang baru sehingga diharapkan penelitian yang ada lebih memiliki data yang

memiliki dinamikanya tersendiri dan sudah tentu terdapat permasalahan-permasalahan baru yang tentu layak diteliti. Dari beberapa hal diatas yang penulis gambarkan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul: **"Dinamika Rivalitas Kubu Reformis Dan Konservatif Di sistem Politik Iran"**

## **B. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi yang berjudul **"Dinamika Rivalitas Kubu Reformis Dan Konservatif Di sistem Politik Iran"** ialah :

1. Untuk mengetahui peranan lembaga pemerintahan dan tokoh-tokoh dari kedua kubu yang bertikai dalam proses pembuatan kebijakan.
2. Untuk menjelaskan dinamika demokratisasi di Iran dalam mengembangkan pemikiran di Iran.
3. Untuk membuktikan bahwa rivalitas kubu konservatif dan reformis di Iran merupakan pertarungan ideologis dan kekuasaan, dikarenakan adanya perbedaan interpretasi konsep dan penerapan *Vilayat-Al-Faqih* di sistem politik Iran.
4. Untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas politik kedua kubu dalam mempertahankan ideologinya masing-masing, serta strategi-strategi

### C. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai negara berkembang, Iran adalah negara dengan masyarakat yang sangat kompleks. Setelah revolusi Iran yang telah berjalan hampir setengah abad, kompleksitas masyarakat Iran tidak berkurang sekalipun. Orang lebih sering mengenal negara Iran sebagai negara yang dikuasai oleh para *mullah*. Berbeda dengan kebanyakan negara lainnya, Iran saat ini tidak mengenal partai politik sebagaimana yang ada di berbagai belahan dunia lainnya.<sup>1</sup> Kekuatan politik negara Iran umumnya lebih dikenal sebagai faksi-faksi yang bersaing satu sama lain untuk mewujudkan Iran sebagaimana harapan mereka masing-masing, walaupun konstitusi Iran telah membuat garis-garis besar tentang apa yang disebut sebagai Republik Islam Iran.

Republik Islam Iran pada dasarnya adalah sebuah negara yang didominasi oleh para ulama.<sup>2</sup> Model pemerintahan seperti ini tidak pernah ada dalam kehidupan kaum *syiah* sejak awal sejarahnya hingga revolusi pecah di Iran tahun 1979. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa model pemerintahan ini merupakan kreasi para ulama Iran di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini yang merupakan pemimpin tertinggi kaum *mullah* di Iran.

Pada awalnya revolusi Iran melahirkan sebuah partai yang dikenal sebagai Partai Republik Islam (PRI).<sup>3</sup> Inilah partai terbesar di Iran pascarevolusi. Namun sebagaimana kekuatan politik lain di dunia, PRI tidak bebas dari perbedaan pendapat yang kemudian menjurus menjadi konflik antar berbagai faksi di dalamnya yang senantiasa bersaing satu sama lain.<sup>4</sup> Dalam tubuh partai tersebut

---

1. ... 2. ... 3. ... 4. ...

terdapat kekuatan, yakni, faksi Konservatif dan faksi Kiri Islam atau sering pula disebut sebagai faksi radikal.

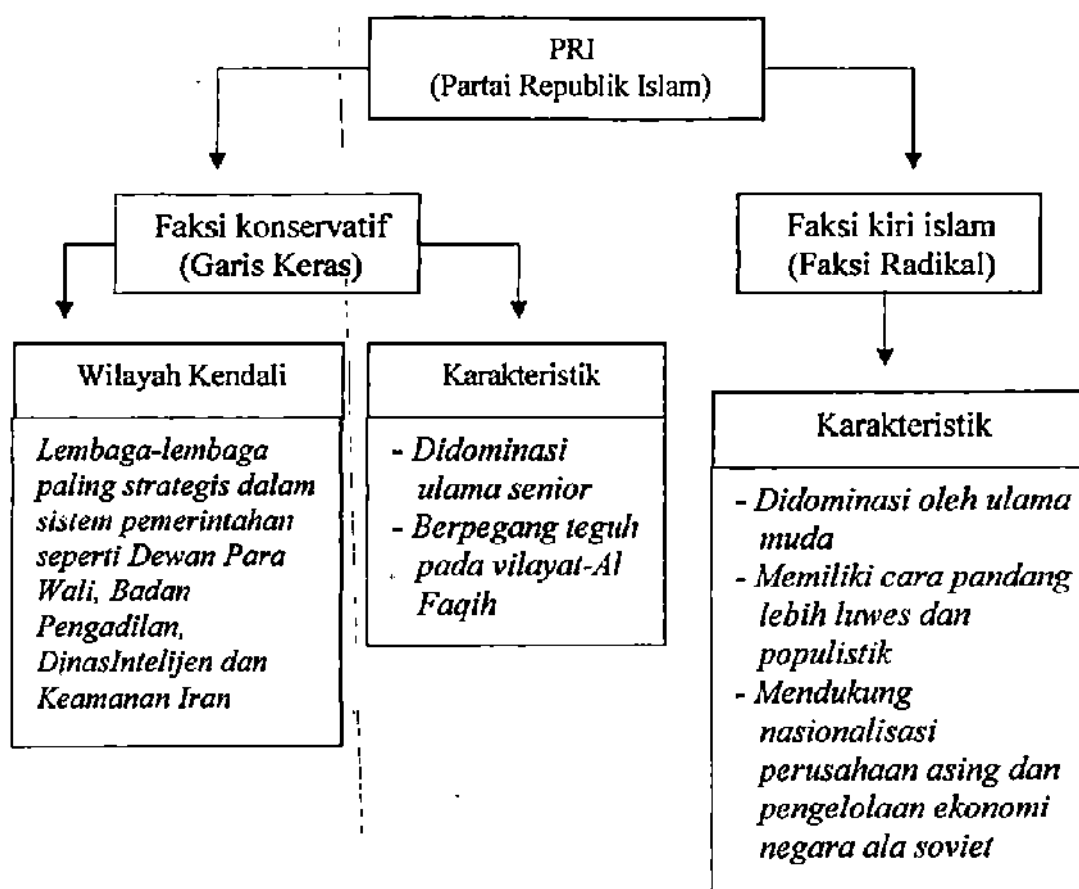
Faksi konservatif adalah faksi yang mengendalikan lembaga-lembaga paling strategis dalam sistem pemerintahan Iran seperti Dewan Para Wali, Badan Pengadilan, Dinas Intelijen, dan Keamanan Iran. Faksi konservatif yang didominasi oleh para ulama senior sangat ketat dalam menjalankan pemerintahan. Mereka berpegang teguh pada *Vilayat-Al-Faqih* dalam menterjemahkan prinsip-prinsip dasar konstitusi Iran.

Faksi terbesar kedua adalah faksi kiri yang didominasi oleh para ulama muda yang cenderung berpikir lebih luwes dan populistik, dalam arti masih bisa menerima pemikiran diluar dari *Vilayat-Al-Faqih*. Pada mulanya faksi ini lebih dikenal sebagai kelompok garis keras karena mendukung nasionalisasi perusahaan asing dan pengelolaan ekonomi negara ala soviet sekalipun mereka menolak marxisme.<sup>5</sup> Semasa Khomeini masih hidup kelompok ini merupakan faksi yang sangat berpengaruh di pemerintahan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 25

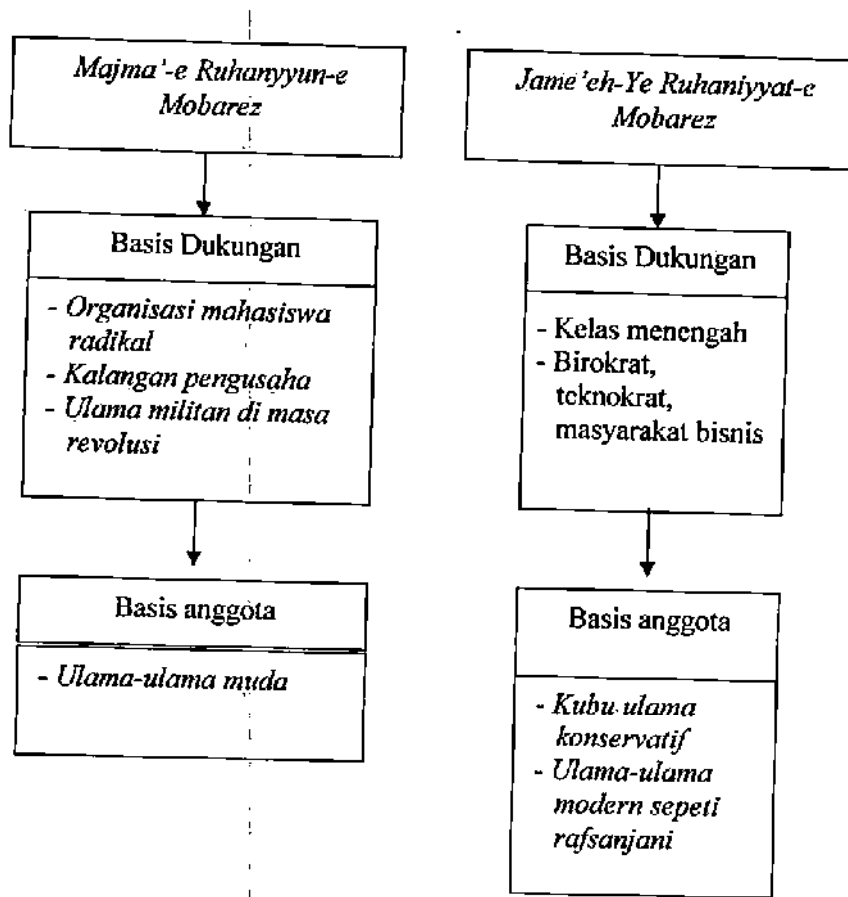
**Gambar 1**  
**Faksi-Faksi Pada Partai Republik Islam**



Persaingan antar ulama bukan hal yang aneh dalam masyarakat *syiah* Iran, *Syiah* tidak membuat orang tergantung sepenuhnya pada pemimpin tertinggi. Selama masih hidup, Ayatullah Khomeini dikenal sangat pintar mengendalikan kecenderungan konflik yang sangat keras antar dua faksi terkemuka.<sup>6</sup> Namun dua tahun sebelum Khomeini meninggal, ia terpaksa membubarkan Partai Republik Iran dikarenakan persaingan antar faksi di dalamnya sudah tak mungkin dibendung lagi.<sup>7</sup> Dampak dari pembubaran partai terkemuka di Iran tersebut

*Mobarez* dan munculnya organisasi ulama tandingan yang mewakili kubu kiri radikal, *Majma'-e Ruhanyyun-e Mobarez*<sup>8</sup>. Kelompok pertama merupakan kubu ulama konservatif plus unsur-unsur moderat seperti Rafsanjani dan orang-orang dekatnya yang kelak memimpin Iran pascapemilihan presiden 1989. Mereka didukung oleh kalangan kelas menengah, birokrat, teknokrat, profesional, dan masyarakat bisnis.<sup>9</sup> Sementara di dalam kubu kiri radikal terdapat tokoh-tokoh terkemuka seperti Montashami (Menteri Dalam Negeri sebelum Rafsanjani), Karubi (ketua Majelis menggantikan Rafsanjani, plus Sheikhislams Seyyed Mohammad Khatami. Kelompok ini mendapatkan banyak pendukung dari organisasi mahasiswa radikal, kalangan pengusaha, dan ulama-militan di masa revolusi. Sudah tentu dinamika perubahan sosial-ekonomi antara 1979-1995 kelak akan mengubah konstelasi pelaku dan pendukung masing-masing faksi.

**Gambar 2**  
Dua Organisasi Ulama Terkemuka di Iran



terganjal oleh kewibawaan Khomeini.<sup>13</sup> Oleh karena itu faksi konservatif mulai melancarkan strategi untuk mereduksi pengaruh faksi kiri di semua pusat kekuasaan.

Koalisi antara faksi pragmatis dibawah Rafsanjani dan faksi konservatif di bawah Ali khomeini juga mendorong perubahan-perubahan besar dalam pemilihan majlis Iran tahun 1992.<sup>14</sup> Aksi gabungan antara kubu konservatif dan pragmatis secara otomatis meruntuhkan dominasi faksi kiri di majlis Iran dan menaikkan posisi faksi konservatif sebagai kekuatan dominan di majlis.<sup>15</sup> Perubahan ini sangat menentukan jalannya proses politik di Iran, karena dengan dikuasainya majlis oleh faksi konservatif mereka memiliki peluang untuk menentukan jalannya pemerintahan Iran dengan diperkuat oleh dukungan dari *ayatullah* Khomeini selaku pemimpin tertinggi ulama *syiah* Iran.

Dengan dikuasainya majlis oleh mayoritas politisi konservatif, dimulailah sebuah era baru politik Iran. Perubahan konstelasi politik di majlis Iran ini dengan sendirinya membuat konflik antara faksi konservatif dan faksi pragmatis pun menjadi tak terhindarkan. Majlis yang kini didominasi faksi konservatif serta dukungan kuat dari faksi konservatif di sejumlah lembaga paling strategis dan kuat dalam sistem politik Iran, telah menjadikan lembaga yang dikuasai kubu konservatif menjadi institusi politik yang sangat agresif.<sup>16</sup> Faksi konservatif dengan cepat menguasai eksekutif dan segera mengambil tindakan untuk menekan pengaruh kubu pragmatis di berbagai posisi pemerintahan.

<sup>13</sup> Meskipun lembaga pemerintahan Iran saat itu didominasi oleh dua faksi yang bertikai (konservatif dan kubu kiri), namun Ali Khomeini -saat itu menjadi pemimpin spiritual Iran- tetap tampil dengan adil. Meskipun Ali Khomeini cenderung pro-konservatif, tetapi Khomeini juga

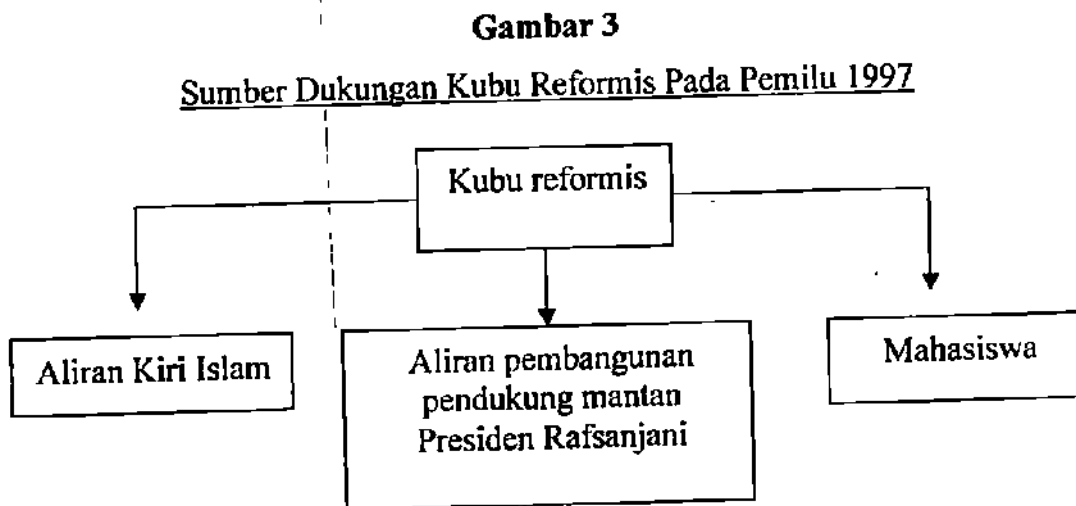


Selanjutnya Faksi Pragmatis –yang menguasai lembaga eksekutif- berubah menjadi kubu konservatif kiri, mereka tidak lagi sejalan dengan kubu konservatif (kanan) yang menguasai parlemen. Kubu konservatif kiri menilai kubu konservatif kanan telah melakukan kesalahan dengan menumbuhkan *status-quo* di lembaga pemerintahan. Pertarungan kubu konservatif kiri dengan kubu moderat plus konservatif kanan berlangsung hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Rafsanjani pada tahun 1997. Kepemimpinan Iran dilanjutkan oleh Presiden Khatami yang memenangkan pemilu presiden tahun 1997. Naiknya Khatami sebagai presiden segera memunculkan pertarungan baru bagi kubu konservatif dengan kalangan pendukung khatami, tak lain kalangan reformis.

Munculnya ke permukaan kutub reformis dan konservatif di Iran dalam empat tahun terakhir (1997-2001) mengandung perhatian intensif, baik dari pengamat dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini bahkan berhasil menumbuhkan minat terbesar terhadap perkembangan Iran dalam sepanjang sejarah negeri itu. Pemilihan presiden di Iran ke tujuh pada 23 mei 1997, merupakan titik balik sejarah negeri itu sejak revolusi Iran tahun 1979. Tak terduga sama sekali, pemilu tersebut menampilkan tokoh reformis mantan Menteri Kebudayaan Muhammad Khatami sebagai pemenang pemilu secara telak atas saingan kuatnya kandidat kubu konservatif Ali Akbar Nateq-Nouri. Khatami tidak hanya sekedar menang, melainkan menang telak yakni mengantongi sekitar 70 persen suara.<sup>17</sup> Suatu hal lebih substantif lagi, kemenangan Khatami itu sebagai hari kelahiran kekuatan politik baru yang lebih di kenal dengan nama kubu reformis ( di Iran dikenal dengan nama *Al Tahni Al Khordat*), kubu reformis itu

<sup>17</sup> Musthafa Abd. Rahman, *Iran Pasca Revolusi (Fenomena Pertarungan Kubu R*

berintikan dari aliran kiri islam, aliran pembangunan pendukung mantan Presiden Hashemi Rafsanjani dan para mahasiswa.<sup>18</sup>



Dalam pemilu Iran 23 mei 1997, tidak ada saatu kandidat yang memiliki keunggulan mencolok atas kandidat lain, baik dari segi kemampuan individu maupun karena dukungan pemimpin spiritual Ayatullah Ali Khomeini.<sup>19</sup> Selain itu, usia 18 tahun revolusi Iran membuat hubungan emosional rakyat-kandidat menyusut.<sup>20</sup> Rakyat Iran kian kritis dan pragmatis melihat para kandidat. Oleh karena itu, semua kandidat berpeluang sama merebut kursi presiden.

Usia revolusi Iran yang sudah 18 tahun (1979-1997) mendorong rakyat berpikir pragmatis dan semakin menanggalkan perasaan emosional, yaitu rasa

kritis terhadap pemerintahannya -menjelang pemilu presiden Iran ke tujuh- dengan berhati-hati dalam memilih presiden mereka. Inilah barangkali faktor utama kemenangan Khatami yang dipandang sebagai simbol modernisme Iran atas Nateq-Nouri yang konservatif. Bisa dikatakan kemenangan sukses Khatami adalah hasil berpikir kritis rakyat Iran yang menginginkan sosok presiden yang bisa membawa ke arah perubahan. Program dan pola pikir Khatami dan kelompoknya telah mengantarkan ia ke kursi presiden. Tetapi tantangan utama Khatami adalah bagaimana ia mampu menjalin koordinasi dengan pemimpin spiritual Ayatullah Ali Khomeini dan lembaga majelis *syura* (parlemen) yang dikuasai kelompok konservatif kanan pimpinan Nateq - Nouri.

Kisah sukses kubu reformis kembali terukir sejarah ketika memenangkan pemilihan anggota parlemen pada Februari tahun 1999, sehingga mengakibatkan kubu konservatif kehilangan lembaga negara penting yang dikuasainya sejak revolusi tahun 1979.<sup>21</sup> Maka semakin lengkap dominasi kubu reformis, yakni pada lembaga eksekutif dan legislatif. Kemenangan kubu reformis dalam pemilu anggota parlemen itu merupakan pukulan politik yang cukup menghentak bagi kubu konservatif. Perkembangan politik yang semakin tidak menguntungkan kubu konservatif memaksa kubu tersebut mulai melakukan perlawanan dengan tangan besi melalui sisa-sisa kekuatan yang ada.

Munculnya ke permukaan kutub reformis dan konservatif di Iran dalam empat tahun terakhir (1997-2001) mengundang perhatian intensif, baik dari

menumbuhkan minat terbesar terhadap perkembangan Iran dalam sepanjang sejarah negeri itu.

Tanggal 9 Juni 2001 adalah hari bersejarah bagi negeri Iran, mengapa tidak, pemilu presiden yang dilaksanakan satu hari sebelumnya telah mengeluarkan nama Khatami sebagai presiden Iran yang ke 8 dan menjadi pemimpin Iran untuk ke dua kalinya.<sup>22</sup> Khatami berhasil meraih 21,7 juta suara atau 77 persen dari 28,2 juta pemilih yang menggunakan hak suaranya, perolehan suara khatami pada pemilu jumat 8 juni 2001 mengalami kenaikan dari 69,1 persen suara (1997) menjadi 77 persen suara (2001).<sup>23</sup>

Dengan hasil ini maka semakin memperpanjang daftar pertarungan kubu reformis dan konservatif di sistem politik Iran. Kubu konservatif memang masih memegang banyak kunci kekuasaan di Iran, dan presiden Khatami akan menemui kesulitan untuk mendobrak dinding tebal kekuasaan kubu konservatif itu. Namun kemenangan telak presiden Khatami adalah sebuah isyarat politik dari akar rumput yang tidak bisa diabaikan.

Pengalaman periode pertama kepemimpinan khatami (1997-2001) hingga kepemimpinannya untuk kedua kalinya yang masih berlangsung (2001-2005) tidak bisa lepas dari rivalitas kedua kubu yang selalu menyertai perjalanan politik negeri Iran saat ini. Kemenangan kubu reformis dalam pemilihan presiden 1997 menimbulkan guncangan dalam tubuh konservatif. Mereka tak pernah menyangka bahwa tokoh tak dikenal sekelas Khatami justru mampu merebut hati dan pikiran

Namun bagi kubu konservatif, mereka tidak menunggu terlalu lama untuk menyesali kegagalan strategi yang mereka lancarkan selama kampanye pemilihan presiden. Kini mereka menunjukkan kematangan mereka sebagai pihak yang kalah perang dengan mendukung kabinet yang dibentuk Khatami untuk kemudian segera mengambil langkah drastis guna mengguncang legitimasi pemerintahan khatami. Meskipun dengan cara-cara represif sekalipun. Hal terpenting bagi kalangan konservatif adalah bagaimana merebut kembali lembaga-lembaga pemerintahan yang telah direbut kalangan reformis semenjak tahun 1997 dan segera mengembalikan nilai-nilai ideologi mereka yang terus merosot selama kepemimpinan kaum reformis saat ini.

Kubu reformis dan kubu konservatif bersaing dalam dua periode pemerintahan Muhammad Khatami, kedua kubu saling mengunggulkan tujuan dan pandangan mereka tentang Negara Iran. Rivalitas kedua kubu sangat menarik untuk diteliti, sebab memiliki dinamika yang kompleks. Pertarungan kedua kubu tidak jarang berdampak langsung pada konstelasi politik dalam negeri Iran dan bagi posisi Iran di kancah politik internasional.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Setelah penulis menguraikan latar belakang masalah diatas dengan melihat kondisi-kondisi yang ada dan berdasarkan kenyataan tersebut maka penulis menarik permasalahan sebagai berikut:

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Konsep Power:

Konsep *power* (kekuasaan;kekuatan) menempati posisi yang istimewa dalam studi politik dan hubungan internasional. Dalam lampiran ini akan dibahas makna konsep *power* dalam studi hubungan internasional, khususnya pada permasalahan “Dinamika rivalitas Kubu Reformis dan Kubu Konservatif di Iran”. Menurut Hans Morgenthau, dia mendefinisikan konsep *power* sebagai suatu *hubungan* antara dua aktor politik di mana aktor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B.<sup>24</sup> Jadi *power* menurut Morgenthau adalah,

“bisa terdiri dari apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain (dan itu) meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu, mulai dari kekerasan fisik sampai ke hubungan psikologis yang paling halus yang dipakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain.<sup>25</sup>”

Selain itu konsep *power* memiliki definisi lainnya seperti yang diajukan oleh Coulombis dan Wolfe. Coulombis dan Wolfe mengajukan dua isu untuk mendefinisikan konsep *power*, “pertama”, memandangnya sebagai suatu hubungan antara aktor-aktor dengan kehendak yang berbeda, “kedua”, konsep *power* sebagai campuran dari berbagai unsur pencrapan pengaruh, baik dengan tindakan yang paling keras, yaitu paksaan militer, pemaksaan ekonomis, sampai kesolidaritas ideologis dan persuasi moral.<sup>26</sup>

Gambar 4

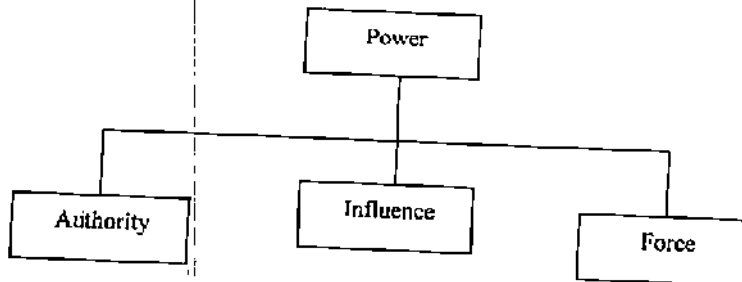
Dua isu utama konsep "power" menurut Coulombis dan Wolfe

ISYU I	ISYU II
suatu hubungan antara aktor-aktor dengan kehendak yang berbeda	konsep <i>power</i> sebagai campuran dari berbagai unsur penerapan pengaruh, baik dengan tindakan yang paling keras, yaitu paksaan militer, pemaksaan ekonomis, sampai kesolidaritas ideologis dan persuasi moral.

Coulombis dan Wolfe mengusulkan pendefinisian *power* secara luas. Di sini *power* merujuk pada apa saja yang bisa menciptakan dan mempertahankan pengendalian aktor A terhadap aktor B. Dalam hal ini *power* bisa dilihat sebagai memiliki tiga unsur penting. *Pertama*, adalah "daya paksa" (*force*), yang bisa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi atau sarana paksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B demi mencapai tujuan politik A. Unsur *kedua*, adalah pengaruh (*influence*), yang bisa didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi (tanpa kekerasan) oleh aktor A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A. Unsur *ketiga*, wewenang (*authority*) yaitu sikap tunduk suka rela aktor B pada arahan (nasihat, perintah) yang diberikan oleh aktor A. Sikap tunduk ini muncul dari persepsi B tentang A, misalnya penghormatan,

keahlian. Dengan demikian, konsep *power* bisa digambarkan dalam skema berikut:

**Gambar 5**  
**Unsur-unsur "Power"**



Pembedaan lain yang harus diperhatikan adalah antara kekuasaan sebagai "tujuan" dan kekuasaan sebagai "sarana". Kekuasaan sebagai "sarana" artinya kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain adalah sarana untuk mencapai tujuan lain, yang mungkin lebih tinggi atau berjangka lebih panjang. Kalau tujuan jangka panjang itu meliputi nilai-nilai seperti perdamaian, keamanan, kemajuan nasional, pembangunan ekonomi, penyebaran demokrasi, maka *power* dianggap penting sebagai "mata uang" untuk "membeli" nilai-nilai itu.

Coulombis dan Wolfe menekankan bahwa *power* tidak bisa dipandang sebagai suatu hubungan yang statik, berlangsung satu-kali dan satu arah. *Power* harus dilihat sebagai hubungan yang dinamis, berlangsung terus-menerus, dan dua-arah. Misalnya, kalau hari ini A mengendalikan perilaku B dalam satu isyu, tiga bulan atau tiga tahun lagi perimbangan kekuatan itu bisa berubah sehingga B bisa mengendalikan perilaku A dalam isyu yang sama.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 119.



Situasi itu akan menjadi lebih rumit ketika kita memperhatikan bahwa hubungan kekuasaan antara dua aktor politik bisa berbeda-beda dari satu isu ke isu lain, dan tergantung pada kemampuan, kepentingan, dan kemauan para pemimpin untuk menerapkan *power* dan unsur-unsurnya demi mencapai tujuan-tujuan mereka. Karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa *power* bisa aktual dan potensial, dan bahwa *power* bisa dibagi ke dalam *power* ekonomi, politik, militer, dan tipe-tipe lain. *Power* aktual adalah kekuatan yang sudah tersedia, sedangkan *power* potensial adalah kekuatan yang bisa diciptakan kalau ada kebutuhan, misalnya karena timbulnya situasi krisis.

#### Mengukur Kuantitas Kekuasaan (*Power*)

Bagaimana mengetahui kuantitas kekuasaan yang dimiliki seseorang atau suatu bangsa? Atau, bagaimana mengukur kekuasaan? Dalam kaitan dengan pengertian pertama ini, jawabannya diberikan oleh "Karl Deutsch". Untuk mengukur *power* yang dimiliki suatu negara, Deutsch membagi konsep itu ke dalam tiga dimensi atau variabel, yaitu wilayah, intensitas dan ruang lingkup kekuasaan. Dengan melihat tiga variabel kekuasaan ini kita bisa mengkuantifikasikan dan membuat *ranking* kekuatan nasional berbagai negara, baik kekuatan yang aktual maupun yang diperkirakan.

##### a. Wilayah Kekuasaan

Untuk mengetahui wilayah (*domain*) kekuasaan seseorang, kita mengajukan pertanyaan: "Siapa dan apa yang dikenai kekuasaan itu?"

Pada umumnya yang menjadi sasaran kekuasaan adalah orang, wilayah

“sekumpulan orang yang perilakunya benar-benar berubah akibat penerapan kekuasaan”.

#### b. Intensitas Kekuasaan

Untuk intensitas kekuasaan, sebenarnya Deutsch menggunakan istilah *range of power* yang didefinisikannya sebagai “perbedaan antara ganjaran yang paling menyenangkan dengan hukuman yang paling menyakitkan yang bisa diberikan oleh pemilik kekuasaan kepada orang-orang yang ada di wilayah kekuasaannya.”

Intensitas kekuasaan juga bisa dibagi ke dalam dimensi internal dan eksternal. Misalnya, di dalam negeri pemerintah bisa menerapkan kekuasaannya atas warganya melalui teknik memberi hadiah atau menghukum. Tiran umumnya lebih bertumpu pada ancaman dan hukuman sebagai teknik untuk menciptakan ketertiban. Sebaliknya, pemerintah demokrat lebih mendasarkan diri pada pemberian rangsangan dan ganjaran positif.

#### c. Ruang lingkup Kekuasaan

Ruang lingkup kekuasaan, oleh Deutsch didefinisikan sebagai “sekumpulan jenis-jenis perilaku, hubungan dan urusan yang secara efektif tunduk pada kekuasaan pemerintah.” Hal ini meliputi semua tipe kegiatan yang coba diatur oleh suatu pemerintah, baik internal maupun eksternal. Sudah jelas bahwa akibat pertumbuhan teknologi dan kota-kota, ruang lingkup internal kekuasaan pemerintah jadi meningkat pesat. Dengan berjalannya waktu, peran pemerintah telah

pengaturan seperti perdagangan dalam dan luar negeri, komunikasi, transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan hubungan perburuhan, penelitian keilmuan, perencanaan pembangunan, dan sebagainya. Jadi, ruang lingkup kekuasaan internal suatu negara diukur dengan banyaknya jenis kegiatan yang dipengaruhi oleh pemerintah.

**Gambar 6**

**Ukuran Kuantitas Kekuasaan Oleh Karl Deutsch**

Kuantitas Kekuasaan	Indikator
Wilayah Kekuasaan	"Siapa dan apa yang dikenai kekuasaan itu?" Pada umumnya yang menjadi sasaran kekuasaan adalah orang, wilayah dan kekayaan. Deutsh mendefinisikan wilayah kekuasaan sebagai "sekumpulan orang yang perilakunya benar-benar berubah akibat penerapan kekuasaan".
Intensitas Kekuasaan	Dimensi internal dan eksternal. Misalnya, di dalam negeri pemerintah bisa menerapkan kekuasaannya atas warganya melalui teknik memberi hadiah atau menghukum. Tiran umumnya lebih bertumpu pada ancaman dan hukuman sebagai teknik untuk menciptakan ketertiban. Sebaliknya, pemerintah demokrat lebih mendasarkan diri pada pemberian rangsangan dan ganjaran positif
Ruang Lingkup Kekuasaan	Bidang-bidang pengaturan seperti perdagangan dalam dan luar negeri, komunikasi, transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan hubungan perburuhan, penelitian keilmuan, perencanaan pembangunan, dan sebagainya. Jadi, ruang lingkup kekuasaan internal suatu negara diukur dengan banyaknya jenis kegiatan yang dipengaruhi oleh pemerintah.

Sebagai tambahan untuk melengkapi pengukuran "kekuasaan" oleh Karl

Gambar 7

**Tabel Pengukur Kekuasaan Karl Deutsch**

Who!		
Gets What		
When		
How		

**Keterangan**

- Who : Negara atau aktor politik lainnya (individu/kelompok).  
 Gets What : Apa yang ingin dicapai (kekuasaan, wewenang, kesejahteraan dll).  
 When : Pada tingkat mana atau "kapan" untuk meraih kekuasaan tersebut, apakah lewat sektor internal (lembaga-lembaga pemerintahan, pemilu, dll), atau sektor eksternal (sumber-sumber lainnya, bantuan pihak asing, lembaga-lembaga, atau aktor politik lainnya).  
 How : bagaimana cara untuk meraih kekuasaan, apakah melalui jalan kekerasan (upaya paksa, militerisasi, dll) atau cara damai (kesejahteraan).

Dalam konteks Iran, yaitu rivalitas kubu konservatif dan reformis rivalitas kedua kubu yang bertikai dalam periode 1997-2004 sangat jelas adanya konflik kepentingan, yaitu perebutan "kekuasaan." Kedua kubu sama-sama mengeluarkan kemampuan (*capability*) mereka untuk mewujudkan tujuan mereka. Dengan kemampuan (*capability*) tersebut, aktor-aktor politik dari kedua kubu saling berebut simpati rakyat untuk mewujudkan cita-cita mereka. Demi memperoleh kekuasaan, kedua kubu melalui aktor-aktor politiknya selalu menggunakan kemampuan mereka, yaitu peran dari jabatan yang mereka peroleh.

Kubu reformis memanfaatkan peran sentral Khatami, berupaya menjalankan misi-misinya dengan menggunakan wewenang Khatami yang menjabat sebagai Presiden Iran. Melalui lembaga eksekutif yang dikuasainya, beberapa kali Khatami melakukan perubahan sistem disektor sosial dan

konstitusi. Begitu juga dengan kubu konservatif, kubu ini masih sangat kuat kuat di sistem politik Iran meskipun kubu reformis menjadi lawan tangguh yang mendapat hati di rakyat Iran. Kubu konservatif menggunakan peran pemimpin Spiritual Iran "Ali Khamenie" untuk melancarkan misi-misi mereka. Usaha-usaha mereka untuk meraih kekuasaan jelas terlihat pada setiap pemilu digelar di Iran (Pemilu Presiden, Pemilihan Anggota Dewan Ahli, Pemilihan DPD, Pemilihan Parlemen), menjadi ajang dan sarana kubu konservatif untuk meraih kekuasaan. Berbeda dengan kubu reformis yang merapkan strategi dengan cara demokrat atau persuasif, kubu konservatif cenderung melakukan tindakan represif terhadap lawan-lawan politiknya. Tak tanggung-tanggung ada yang dibunuh, diculik, bahkan dimasukkan ke dalam penjara dengan masa hukuman yang cukup lama.

Gambaran mengenai peta perebutan kekuasaan kedua kubu ini, dapat dilihat dibawah ini:

**Gambar 8**  
**Peta Rivalitas Kedua Kubu**

<b>WHO</b>	<b>Kubu Reformis</b>	<b>Kubu Konservatif</b>
<b>Gets What</b>	Kekuasaan	Kekuasaan
<b>When</b>	- Pemilu Presiden - Pertarungan di Tingkat Majelis ( pemilihan anggota dewan ahli, pemilihan DPD Kota Praja, dan pemilihan anggota parlemen)	- Pemilu Presiden - Pertarungan di Tingkat Majelis ( pemilihan anggota dewan ahli, pemilihan DPD kota praja, dan pemilihan anggota parlemen)
<b>How</b>	- Di setiap kampanye pemilu selalu memvandaikan tentang	- Di setiap kampanye pemilu, kubu konservatif keran

<p>demokratisasi, keterbukaan, dan modernisasi. Kubu reformis selalu menarik simpati rakyat dengan menampung seluruh aspirasi rakyat.</p> <p>- Kubu reformis untuk menang dalam pemilu sangat perlu sokongan dari orang-orang berpengaruh di Iran, untuk itu di setiap pemilu pasti beraliansi dengan tokoh-tokoh atau <i>mullah</i> terkemuka. Seperti pada pemilu 1997, calon presiden Khatami beraliansi dengan mantan presiden Rafsanjani untuk mendongkrak suara Khatami.</p> <p>-Kubu reformis juga menggunakan media massa untuk menarik simpati rakyat, sebagai penyampaian akan misi-misinya kepada rakyat. Sehingga pada saat menjelang pemilu banyak koran-koran berhaluan reformis bermunculan.</p>	<p>melakukan kecurangan. Kampanye mereka selalu berisi kampanye negatif yang mendiskreditkan kubu reformis. Mereka menyerang tokoh-tokoh reformis sebagai ulama sesat yang menyimpang dari nilai-nilai revolusi Islam Iran.</p> <p>- Sama seperti kubu reformis, kubu konservatif selalu beraliansi di setiap menjelang pemilu. Tokoh utama mereka dalam beraliansi adalah Ali Khamenei (Pemimpin Spiritual Iran), <i>mullah</i> konservatif, faksi-faksi di parlemen yang pro-konservatif, anggota dewan garda, dewan kemashalatan umat, dan kelompok militan pro-konservatif.</p> <p>- Media massa pro-konservatif juga diterbitkan menjelang pemilu, berita-berita yang kabarkan selalu berisi fitnahan terhadap kubu reformis. Kubu konservatif yang menguasai secara keseluruhan lembaga yudikatif, melakukan tindakan represif dengan menutup sebagian besar media massa reformis, ini sebagai upaya membendung pergerakan kubu reformis yang mulai banyak disukai oleh rakyat Iran.</p> <p>- Kubu konservatif juga melakukan</p>
---	---

		tindakan represif lainnya yaitu melakukan penculikan terhadap tokoh-tokoh pemerintahan ataupun <i>mullah</i> yang diketahui mendukung gerakan reformasi di Iran.
<b>Aktor/lembaga Politik Utama</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muhammad Khatami</li> <li>- Muhammad Reza Khatami</li> <li>- Eksekutif (1997-2004), dalam dua periode Khatami menjadi Presiden Iran</li> <li>- Parlemen (legislatif), sejak Tahun 1996 hingga 2004 kubu reformis menguasai lembaga ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemimpin Spiritual Iran, Ali Khamenei</li> <li>- Dewan Garda, Dewan Kemashalatan Umat, Lembaga Yudikatif</li> <li>- Parlemen (legislatif), mulai tahun 2004 kubu konservatif merebut lembaga ini dari dominasi kubu reformis</li> </ul>
<b>Ideologi yang di bawa</b>	- Demokratisasi, keterbukaan, modernisasi.	- Menjadikan Iran sebagai negara yang memegang teguh nilai-nilai Revolusi Islam Iran, dengan bersandar pada <i>Vilayat Al-Faqih</i> sebagai pedoman utama.

## 2. Konsep Demokrasi

### a. Pemilu Jurdil dan Kompetitif sebagai Esensi Demokrasi<sup>28</sup>

Mengingat gagasan dan praktek demokrasi pertama kali berkembang di Yunani sebagaimana telah dijelaskan, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan) yang berarti kekuasaan oleh rakyat. Karena itu demokrasi merupakan suatu sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang yang sama dilihat dari segi politik.

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan penting pemerintah – atau garis kebijakan di belakang keputusan tersebut – secara langsung atau tidak langsung hanya dapat terjadi jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa. Secara praktis, demokrasi adalah cara untuk menetapkan otoritas di mana rakyat memilih pemimpin-pemimpin mereka. Jika dalam sistem politik lainnya, orang-orang tertentu dapat menjadi penguasa karena keturunan, kekayaan, penunjukan, nasib, atau paksaan dengan kekerasan, maka dalam demokrasi ada dua kemungkinan. Pertama, penguasa dan rakyat identik seperti dalam demokrasi langsung ala Yunani kuno, atau para penguasa dipilih oleh rakyat dengan memberikan suaranya. Sebuah negara bangsa modern mempunyai suatu sistem politik yang demokratis hingga tingkat di mana pembuat-pembuat kebijakan yang paling berpengaruh ditentukan lewat pemilihan umum yang jujur, adil, diadakan secara berkala, para kandidat secara bebas bersaing untuk memperoleh suara terbanyak, dan praktis



semua penduduk yang telah memenuhi syarat dapat menyatakan pilihannya. Menurut definisi prosedural ala Schumpeter ini, karenanya, pemilihan umum merupakan esensi demokrasi.

Sehingga demokrasi merupakan sistem politik yang melembagakan kontrol terhadap pemerintah serta kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban (*accountability*)-nya kepada rakyat melalui sebuah sistem perwakilan. Ia hendak membuat nyata kedaulatan rakyat dan ia melakukannya lewat suatu sistem kompleks kelembagaan dan mekanisme politik serta hukum yang mengoperasionalisasikan kedaulatan rakyat tersebut. Yaitu pemilihan umum yang jujur, adil, dan kompetitif, lembaga perwakilan rakyat, lembaga eksekutif atau birokrasi, lembaga peradilan yang independen, pers dan media yang bebas dan lain-lain. Jadi, pertama, demokrasi merupakan suatu paket politik yang didalamnya terdapat, nilai, mekanisme, dan kelembagaannya, kedua, dalam demokrasi pun, pemerintahan masih sebagai urusan suatu elite, yang karenanya demokrasi modern tidak menghilangkan "hukum besi *oligarki*", hanya saja dilemahkannya.

#### b. Demokrasi bukan Mayoritasisme dan Elitsisme<sup>29</sup>

Di samping demokrasi meletakkan pemilu yang jujur, adil dan kompetitif sebagai esensinya, demokrasi juga, secara prosedural, berjalan diatas prinsip mayoritas. Pertimbangannya adalah karena seperti yang diungkapkan John Stuart Mill (1806-1873), bahwa pendapat mayoritas

Demokrasi adalah "*majority rule, minority right*". Suatu negara disebut demokrasi sejauh mana negara tersebut menjamin hak asasi manusia (seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan beragama), bagi kelompok minoritas sekalipun. Sistem politik demokrasi adalah sistem menolak diktatorisme, feodalisme, dan totalitarisme. Dalam demokrasi hubungan antara penguasa dan rakyat, termasuk di dalamnya kaum minoritas, bukanlah hubungan kekuasaan, tetapi berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi HAM tersebut.

Demokrasi dengan demikian, pengertiannya tidak hanya menolak mayoritisme (bedakan dengan prinsip mayoritas dan moral sekaligus), melainkan juga menolak elitisme (bedakan dengan elite yang bertanggung jawab kepada rakyat). Dalam pengertian elitisme, demokrasi hanya menjadi alat dan menguntungkan elite tertentu, tidak memajukan masyarakat secara umum. Demokrasi yang harus diberlakukan, seperti yang berlaku sekarang adalah demokrasi dengan hak-hak asasi yang terlindung. Dalam rumusan "*commission of jurists, "kekuasaan di tangan mayoritas diselenggarakan dalam suatu rangka legal pembatasan"*. Pembatasan konstitusional dimaksud untuk menjamin bahwa asas dan hak fundamental tertentu tidak tergantung pada suatu mayoritas yang tidak tetap atau tidak wajar.

Dalam konteks Iran, penulis menilai dinamika rivalitas kedua kubu sangat dominan berada di lembaga kenegaraan. Kubu reformis setelah pemilu 1997 mayoritas menduduki kursi legislatif dan eksekutif harus

syiah). Lewat kekuatan angkatan kepolisian dan pengadilan, para reformis disikat. Undang-undang dan peraturan yang dibuat pemerintahan reformis dimentahkan lewat keputusan pengadilan.

Selanjutnya pertarungan ini berlanjut pada pemeliharaan status quo oleh kaum konservatif dengan memelihara orientasi politik pada nilai-nilai revolusi yang dicetuskan pada akhir dasawarsa 1970-an. Sistem kekuasaan tidak boleh keluar dari kerangka revolusi Islam Iran padahal, ketika revolusi pecah tahun 1979, kelompok konservatif yang kini berkuasa merupakan kaum muda dan mahasiswa yang berada di garis paling depan pada saat itu. Jadi dalam demokrasi pun, pemerintahan masih sebagai urusan suatu elite, yang karenanya demokrasi modern tidak menghilangkan "hukum besi *oligarkhi*", hanya saja dilemahkannya.

## F. Hipotesa

Rivalitas kubu konservatif dan reformis di sistem politik Iran memiliki dinamika yang tertuju pada :

### 1. Pertarungan di Tingkat Pemilihan Umum

Bagi kedua kubu, rakyat adalah kunci utama untuk mewujudkan atau melegalkan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua kubu. Sehingga pemilu adalah tempat kedua kubu bersaing secara langsung, seperti melalui

2. Persaingan kedua kubu untuk saling merebut kekuasaan di lembaga pemerintahan

Lembaga pemerintahan merupakan tujuan utama bagi kubu reformis maupun konservatif dalam memenangkan rivalitas ini, sebab siapa yang dapat menguasai lembaga ini, khususnya parlemen, akan semakin mudah untuk memenangkan persaingan persaingan tersebut.

3. Pertarungan dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya

Kalangan konservatif tidak dapat menerima gagasan-gagasan liberal kalangan reformis dalam mengembangkan pemikiran di Iran.

### G. Batasan Penelitian

Batasan penelitian diawali dari masa pasca revolusi Iran, ini untuk menjelaskan dinamika faksi-faksi yang ada pasca revolusi. Ditcruskan dengan naiknya Khatami sebagai Presiden Iran dari masa kepemimpinan pertamanya (1997-2001), dan dilanjutkan dengan masa kepemimpinan periode ke dua-nya (2001-2004). Karakteristik kubu reformis dan konservatif serta tokoh-tokohnya yang ada di *majelis* dijadikan penulis sebagai sumber penelitian, dilanjutkan dengan agenda-agenda politik dan isu-isu kontemporer yang berlangsung dalam periode (1997-2004).

### H. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka-teori dan konsep kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan

dengan studi kepustakaan atau *library research*. Oleh karena itu data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah ilmiah, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, internet dan sumber-sumber lain.

## **I. Sistematika Penulisan**

Setelah diawali dengan Bab I yang mana berisikan pendahuluan yang memuat berbagai ketentuan metodologis, kemudian dilanjutkan dengan :

Bab II : Iran pasca revolusi, meliputi dinamika faksi-faksi politik di Iran, meliputi polemik kubu konservatif kanan dan kiri, pragmatis-konservatif kiri, pragmatis konservatif kanan, dan konservatif-reformis, serta demokrasi pasca revolusi.

Bab III : Kelahiran kubu reformis, peran sentral Khatami dalam gerakan reformasi di Iran, profil kehidupan Khatami dan peran kemenangan Khatami pada pemilu 1997.

Bab IV : Dinamika rivalitas kubu reformis dan konservatif periode 1997-2004, dengan menjelaskan di wilayah mana saja tarik-menarik ke dua kubu, meliputi pertarungan di tingkat majelis dan dalam kebijakan-kebijakan Khatami di bidang sosial, ekonomi dan budaya, sampai kepada kampanye kedua kubu pada pemilu presiden, aksi intimidasi kubu konservatif, serta pemilu wali kota.

Bab V : Kesimpulan Penelitian.